

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama, yakni: (1) bagaimana potret aktor jaringan pemenangan dan penguatan posisi politik Ngesti Nugraha dalam Pilkada Kabupaten Semarang Tahun 2024; dan (2) bagaimana strategi politik yang digunakan dalam menjaga konstituen sehingga terpilih kembali. Berdasarkan analisis mendalam terhadap data primer hasil wawancara dengan narasumber yang dianalisis menggunakan kerangka Teori Modal Sosial, *Social Network Theory*, serta *Political Marketing* dan *Political Positioning* penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

4.1.1 Kesimpulan Pertama: Potret Aktor Jaringan dan Penguatan Posisi

Politik

Pertama, kemenangan Ngesti Nugraha dengan 80,24 persen suara pada Pilkada Kabupaten Semarang Tahun 2024 merupakan kulminasi dari akumulasi modal sosial tiga dimensi yang diinvestasikan secara konsisten selama lebih dari dua dekade. Dimensi kepercayaan (*trust*) terbangun melalui rekam jejak kinerja yang dapat diverifikasi dari legislatif tiga periode, wakil bupati, hingga bupati periode pertama—yang menghasilkan basis kepercayaan publik yang sangat dalam dan tidak mudah tergoyahkan oleh serangan politik lawan. Dimensi jaringan (*networks*) terwujud dalam ekosistem jaringan multilayer yang mencakup mesin 14 partai politik, birokrasi 235 desa, jaringan NU dan organisasi keagamaan, relawan

organik, dan beragam komunitas lokal. Dimensi norma (*norms*) tercermin dalam kemampuan Ngesti Nugraha untuk menempatkan diri dalam bingkai nilai-nilai religius dan kultural masyarakat Kabupaten Semarang yang majemuk tanpa melakukan diskriminasi berbasis identitas.

Kedua, aktor-aktor jaringan pemenangan Ngesti Nugraha bersifat multilayer dan lintas sektor. Menggunakan kerangka *Social Network Theory* (Borgatti et al., 2013) dan konsep structural holes (Burt, 1995), Ngesti Nugraha terbukti berhasil memposisikan dirinya sebagai *central network broker* yang menghubungkan berbagai kelompok yang sebelumnya tidak saling terhubung secara langsung. Posisi broker ini memberikan keunggulan berlipat: *information advantage* (akses lebih awal dan komprehensif terhadap informasi dari berbagai segmen), *control advantage* (kemampuan mengendalikan aliran narasi politik), dan *coalition advantage* (kapasitas membangun konsensus lintas partai dan organisasi yang menghasilkan koalisi 14 partai).

Ketiga, pemilihan Nur Arifah sebagai pasangan calon merupakan keputusan strategis yang mengintegrasikan dua lapisan jaringan krusial sekaligus: jaringan birokrasi desa (melalui posisinya sebagai kepala desa aktif) dan jaringan organisasi keagamaan terbesar (melalui posisinya sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Semarang). Integrasi dua lapisan jaringan ini melalui satu keputusan merupakan pencapaian efisiensi strategis yang signifikan dalam ekosistem pemenangan.

Keempat, dimensi kultural yang meliputi nilai-nilai religius berbasis NU dan etika kepemimpinan Jawa terbukti merupakan variabel aktif yang secara

signifikan membentuk efektivitas jaringan dan penerimaan masyarakat terhadap kandidat. Adaptasi pendekatan terhadap kearifan lokal yang berbeda di setiap wilayah Kabupaten Semarang bukan sebagai strategi defensif tetapi sebagai investasi legitimasi kultural menjadikan Ngesti Nugraha sebagai figur yang melampaui sekat-sekat identitas dalam konstruksi dukungan politiknya.

4.1.2 Kesimpulan Kedua: Strategi Politik dalam Menjaga Konstituen

Pertama, keempat strategi political marketing Collins & Butler (2013) bahwa *reinforcement*, *rationalization*, *inducement*, dan *confrontation* diimplementasikan secara terintegrasi dan sinergis, bukan sebagai pilihan yang saling eksklusif. Strategi penguatan berfokus pada pemeliharaan loyalitas pemilih lama melalui program "NGOPI," publikasi capaian kinerja, dan kehadiran fisik yang konsisten. Strategi rasionalisasi menetralkan dampak elektoral dari kritik melalui kontekstualisasi sistemik, counter-narrative berbasis pencapaian, dan *forward commitment*. Strategi bujukan memperluas basis ke segmen pemilih muda (melalui digitalisasi kampanye dan program beasiswa), pemilih perempuan (melalui jaringan Muslimat NU), dan wilayah non-basis (melalui pendekatan multi-kanal yang disesuaikan). Strategi konfrontasi dipilih dalam format implisit "*adu program, bukan adu serangan*" yang terbukti efektif dalam budaya politik Jawa yang menghindari konflik terbuka.

Kedua, ketiadaan *money politics* sebagai instrumen mobilisasi pemilih merupakan pilihan strategis yang secara *counterintuitive* justru memperkuat loyalitas pemilih. Loyalitas yang dibangun berbasis program dan kinerja jauh lebih stabil dan tahan terhadap defeksi dibandingkan loyalitas transaksional yang bersifat

sementara dan rentan terhadap tawaran insentif dari kandidat lain. Keputusan ini sekaligus menempatkan kemenangan Ngesti Nugraha sebagai model kontestasi elektoral yang berintegritas dan dapat menjadi referensi positif bagi praktik demokrasi lokal di Indonesia.

Ketiga, program "NGOPI" (Ngolah Pikir Bareng-bareng) sebagai forum dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat terbukti menjadi instrumen pemeliharaan hubungan konstituen yang paling efektif. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran aspirasi, tetapi juga sebagai mekanisme *early-warning* terhadap potensi kekecewaan, sebagai bukti komitmen kepemimpinan partisipatif, dan sebagai arena pembangunan rasa kepemilikan masyarakat terhadap agenda pembangunan. Inovasi komunikasi politik semacam ini dapat menjadi model bagi kepala daerah lainnya dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan konstituennya.

Keempat, peningkatan perolehan suara dari 67,1 persen (2020) menjadi 80,24 persen (2024) sebuah lonjakan 13,14 poin persentase merupakan bukti empiris yang paling kuat dari keberhasilan keseluruhan grand strategy kemenangan yang dijalankan. Lonjakan ini mengindikasikan keberhasilan strategi bujukan dalam menarik pemilih baru sekaligus mengkonfirmasi efektivitas strategi penguatan dalam mempertahankan basis pemilih yang ada.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan saran-saran yang ditujukan kepada tiga pihak yang paling relevan dengan implikasi penelitian untuk praktisi politik dan kandidat di Pilkada.

Pertama, membangun modal sosial perlu dipahami dan diperlakukan sebagai investasi jangka panjang yang dimulai jauh sebelum tahun kontestasi, bukan sebagai aktivitas yang hanya dilakukan dalam masa kampanye. Kepercayaan publik terbukti merupakan aset yang paling bernilai dan berkelanjutan dalam kemenangan pilkada lebih dari sumber daya finansial maupun dukungan partai yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kandidat yang berinvestasi pada pelayanan nyata dan konsisten kepada masyarakat jauh sebelum tahun kampanye akan menuai return elektoral yang jauh lebih signifikan dan berkelanjutan.

Kedua, desain jaringan kemenangan perlu bersifat multilayer mengintegrasikan kekuatan formal partai politik dengan kekuatan informal organisasi *civil society*, birokrasi desa, jaringan relawan organik, dan komunitas lokal. Ketergantungan berlebihan pada satu lapisan jaringan misalnya hanya mesin partai menciptakan kerentanan strategis yang dapat dieksploitasi oleh lawan politik.

Ketiga, pemilihan pasangan calon merupakan keputusan strategis yang perlu mempertimbangkan tidak hanya popularitas personal, tetapi juga jaringan yang dibawa oleh pasangan tersebut. Kasus Nur Arifah yang secara simultan mengintegrasikan jaringan birokrasi desa dan jaringan NU menunjukkan bahwa

satu keputusan pemilihan pasangan yang tepat dapat menghasilkan efisiensi strategis yang sangat signifikan.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, penggunaan metode kualitatif dengan purposive sampling memberikan kedalaman analisis yang tinggi, namun membatasi kemampuan generalisasi temuan ke konteks daerah lain yang memiliki karakteristik sosiologis dan politikal yang berbeda. Temuan penelitian ini paling relevan dalam konteks Kabupaten Semarang dan daerah-daerah dengan karakteristik serupa didominasi masyarakat Jawa, berlatar tradisi NU yang kuat, dan memiliki sejarah dominasi PDIP yang panjang di Jawa Tengah.

Kedua, wawancara narasumber masyarakat terbatas pada enam informan di empat kecamatan (Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bandungan/Ambarawa, Bawen, dan Ambarawa) dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Representasi wilayah yang belum mencakup seluruh kecamatan khususnya wilayah-wilayah industri seperti Bergas, Pringapus, dan Ungaran Barat yang memiliki karakteristik pemilih urban yang berbeda membatasi komprehensivitas temuan. Penelitian lebih lanjut dengan cakupan geografis yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak akan menghasilkan gambaran yang lebih representatif.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen internal tim pemenangan yang bersifat konfidensial seperti peta pemetaan pemilih, strategi digital yang lebih rinci, dan rencana alokasi sumber daya kampanye membatasi

kemampuan peneliti untuk memverifikasi secara lebih mendalam aspek-aspek teknis dari implementasi strategi pemenangan yang tidak sepenuhnya terungkap dalam wawancara. Triangulasi data yang lebih intensif dengan sumber-sumber dokumen internal akan memperkuat validitas internal penelitian ini ke depannya.